

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, tuntutan terhadap metode pengajaran serta perlunya peningkatan pada materi pendidikan. Maka Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung, sebagai lembaga akademis yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, menetapkan kurikulum yang fleksibel dan mampu mengakomodasi perkembangan yang ada. Salah satunya dengan memberikan mata kuliah Kerja Praktek kepada mahasiswa.

Dengan kerja praktek inilah, mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti dan memahami pekerjaan di lapangan. Seluruh mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi semata, namun yang lebih penting adalah mahasiswa memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa teori yang diterimanya dari bangku kuliah berbeda dengan masalah yang dihadapi di lapangan nantinya.

Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung merupakan salah satu unit penyokong pembangunan di Kota Bandung dengan memberikan sumber

pendapatan Pajak Daerah yang harus ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pajak daerah adalah pemungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dasar hukum pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah berdasarkan PERDA No. 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2011 dan mulai berlaku bulan Januari 2011 di Kota Bandung. Pemerintah Daerah melalui Kantor Pelayanan Validasi BPHTB mempunyai tugas berat dalam hal pelayanan kepada publik yang berkaitan dengan pemungutan dan pengurusan pajak BPHTB.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti berkaitan dengan pengurusan Pajak BPHTB yang berada di Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan membayar pajak disebut wajib pajak. Pada saat ini Dinas pelayanan pajak kota Bandung telah memiliki aplikasi pengolahan data BPHTB berbasis web sebagai sarana kinerja pengurusan BPHTB di Kota Bandung. Namun aplikasi

tersebut memiliki kekurangan yaitu pada saat update data terbaru biasanya orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut sering berubah, sehingga sering terjadi kesalahan pemahaman dalam Pengolahan Data, masih terdapat data atau file yang tidak sesuai di dalam satu provinsi, seharusnya setiap data harus sesuai dengan data yang benar, serta belum efektifnya pengelolaan data karena regional Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia terlalu banyak dan menghambat untuk penginputan data.

Dari tersebut Maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai aplikasi BPHTB yang selanjutnya dituangkan dalam judul: “ANALISIS SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA BPHTB PADA DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) KOTA BANDUNG”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pentingnya di dalam sistem pengolahan data elektronik ini yang telah berjalan di Dinas Pelayanan Pajak pada umumnya telah berjalan baik, tetapi kami melihat adanya masalah kekurangan pada pengolahan data tersebut. Adapun Mmsalah kekurangan adalah sebagai berikut :

1. Pada saat update data terbaru biasanya orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut sering berubah, sehingga sering terjadi kesalahan pemahaman dalam Pengolahan Data.
2. Masih terdapat data atau file yang tidak sesuai di dalam satu provinsi, seharusnya setiap data harus sesuai dengan data yang benar.

3. Belum efektifnya pengelolaan data karena regional Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia terlalu banyak dan menghambat untuk penginputan data.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi masalah, berikut adalah rumusan masalahnya :

1. Bagaimana sistem pengolahan data BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ini berjalan menarik
2. Bagaimana cara kerja dari sistem pengolahan data BPTHB terhadap user

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dan Tujuan dilakukan Kerja Praktek Lapangan adalah untuk menganalisis masalah Pengolahan Data BPHTB yang terjadi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem Permasalahan yang terjadi dalam pengolahan data BPHTB.
2. Untuk mengetahui dan memahami prinsip kerja dari sistem Pengelolaan Data BPHTB.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembatasan masalah ini dapat dilakukan secara terarah dan tercapai tujuannya, maka perlu ditetapkan batasan dari masalah yang akan dibahas. Batasan-batasan masalah dari penelitian ini yaitu :

